

PROPOSISI

Pemerintahan Global dan Perencanaan Strategis Universitas

SETIAP tahun, sejumlah pemerintahan universitas dunia, seperti Quacquarelli Symonds World University Ranking (QSWUR) dan Times Higher Education World University Ranking (THEWUR), merilis daftar peringkat perguruan tinggi internasional (World Class University, WCU). Diakui atau tidak, pemerintahan ini sudah menjadi bagian penting dalam global landscape pendidikan tinggi.

Pro dan kontra terhadap pemerintahan dunia tersebut jamaik ditemukan dalam diskusi akademik dan pengambil kebijakan perguruan tinggi (Robertson dan Olds, 2016). Diverensi pendapat terus berkembang. Namun pada saat yang sama, semakin banyak perguruan tinggi dan pengambil kebijakan pemerintahan yang merespons tren pemerintahan ini. Di sisi lain, pemerintahan ini juga berperan dalam membentuk opini masyarakat, mitra akademik, dan pengguna lulusan tentang kualitas perguruan tinggi. Tren ini merepresentasikan kompleksitas upaya perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing dan berdampak pada masyarakat di tingkat global dan men-

jadikan pemerintahan sebagai komponen penting dalam perencanaan strategis institusi. Dalam perspektif posisi perguruan tinggi terhadap lembaga pemerintahan, pada dasarnya universitas berada dalam situasi *fail accomplish* (Taylor dan Braddock, 2007). Universitas tidak memiliki klasa atas sistem dan metodologi pemerintahan sehingga sistem dan metodologi pemerintahan tidak dapat mendukung pengukuran kinerja universitas.

Menyikapi hal ini, universitas perlu memandang peringkat bukan sebagai suatu tujuan. Melainkan lebih sebagai pengungkit untuk meningkatkan relevansi dan dampak. Pemerintahan dapat dipandang sebagai leverage dalam strategi pencapaian keunggulan bidang akademik, riset, dan pengabdian masyarakat.

OECD (2007) dalam studi di 41 negara menyatakan bahwa 68 persen manajemen universitas menggunakan skema pemerintahan sebagai alat untuk perubahan strategik, organisasi, manajerial, dan perubahan lingkungan akademik. Sebagai contoh, keunggulan dalam

Sehingga, insight dari pemerintahan berperan sebagai sumber informasi yang memandu perumusan kebijakan, bukan mengintervensi metode perumusan perencanaan dan evaluasi program.

Pada level bidang ilmu, pemeringkatan menjadi indikator program studi mana yang paling kompetitif dari sebuah universitas. Oleh karena itu, pemerintahan berbasis *subject ini dapat mem-*

*bantu universitas dalam upaya differensiasi, baik di area akademik maupun riset. Peringkat ini memberikan informasi dan orientasi ke arah mana *market niche* dan sumber daya, seperti seberapa besar investasi yang harus dilakukan oleh universitas dalam sumber daya manusia, kemitraan dengan dunia akademik dan dunia industri, serta komitmen finansial dalam pengembangan area tertentu agar tetap kompetitif dan relevan di kancah global.*

Informasi reputasi akademik dalam pemerintahan global juga dapat menjadi sumber informasi bagi universitas dalam merancang ulang strategi internasionalisasi program studi. Perkembangan

pendidikan tinggi di dunia yang mengarah pada *broad-based curriculum* dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan *degree comparability* dan memperluas keramplilan mahasiswa melalui kerja sama global. *Cross-border education* ini tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga pengalaman pembelajaran mahasiswa serta *job opportunity*.

Bagaimana perencanaan strategis sebuah universitas dapat disesuaikan dengan perkembangan dalam pemerintahan dunia merupakan satu simbol bahwa lingkungan pendidikan tinggi tidak lepas dari berbagai perubahan. Di setiap perubahan tersebut, setiap universitas dituntut *agile*, tidak hanya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, namun juga untuk menjawab setiap tantangan agar bisa terus relevan dan kompetitif di dunia internasional. (•)

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP) Universitas Airlangga



Oleh
DIAN EKOWATI *

Pembaca Menulis